

IMF adalah mengurus krisis hutang internasional yang mulai bermunculan di berbagai negara peminjam. Sebagaimana hutang di negara-negara Dunia Ketiga membengkak dan tampak-nya akan tak terbayar, sesuatu yang akan membuat sistem eko-nomi internasional tersebut kembali kolaps, baik IMF maupun Bank Dunia mulai menawarkan pinjaman baru dengan syarat negara-negara penghutang tersebut setuju dengan program-program struk-tural di bawah koordinasi korporasi-korporasi internasional yang mereka dukung. Program yang ditawarkan itu pada intinya untuk “mempermurah ongkos produksi bagi korporasi-korporasi internasional” tersebut (David Ranney, *The Evolving Supra-National Policy Arena*, University of Illinois Chicago 1993, hlm 24) dengan cara:

- Mereduksi pengeluaran pemerintah, untuk mengontrol inflasi dan mereduksi tuntutan aliran kapital dari luar, se-buah langkah yang dalam prakteknya diterjemahkan ke dalam pemotongan pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan;
- Pemotongan upah atau menekan kenaikannya dengan ke-ras demi mereduksi inflasi dan membuat ekspor lebih kompetitif;
- Liberalisasi impor untuk membuat industri lokal lebih efi-sien dan memberlakukan insentif bagi produksi yang ber-wawasan pasar ekspor, yang dapat dilihat baik sebagai sebuah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh pasar luar negeri dan juga sebuah sumber daya pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis daripada sekedar pasar lokal;
- Menghilangkan batasan-batasan investasi luar negeri da-lam bidang industri dan layanan finansial untuk membuat produksi lokal dan layanan pengantarannya lebih efisien, atas kehadiran kompetitor dari luar negeri;
- Menurunkan nilai suku bunga lokal yang berbanding de-ngan dolar demi membuat ekspor lebih kompetitif; dan
- Memprivatisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan memulai penghapusan aturan-aturan secara radikal demi mempromosikan alokasi sumber-sumber daya sesuai atur-an pasar bukan lagi oleh aturan pemerintah. (Walden

reportase kronologis KASUS TANAH RUMPIN, BOGOR



8 September 2005 | TNI AU mendarangi tanah kavling warga lalu merusak patok batas tanah dan memasang plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (SP KSAP) No. 23/P/KSAP/50. Oktober 2006, TNI AU yang diwakili oleh Kol. Dery Pemba Syafar mulai membujuk warga melalui Ketua RT setempat, H. Amir, agar menjual tanah mereka yang berada di blok Cisauk Persil 20 seluas 10 Ha seharga Rp 7000/meter. Saat itu warga tetap menolak untuk menjualnya. Namun menurut pi-hak TNI AU, tanah tersebut adalah bagian dari tanah 1000 Ha yang diklaim sebagai milik mereka berdasarkan SP SKAP No. 23/P/KSAP/50 dan Surat Keputusan Bupati Bogor: 591/194/Kpts/Huk/2003.

8 November 2006 | TNI AU dilengkapi senjata laras panjang mulai menduduki lokasi persawahan milik warga. Dengan membawa Beko dan alat berat lainnya, mereka mulai menggali lahan persawahan yang terbelang masih sangat produktif terse-but. Aksi tersebut memancing reaksi warga.

9 November 2006 | Sekitar 250 warga melakukan demons-trasi di lokasi penggalian. Aksi warga disaksikan oleh Kepala De-sa, Ketua BPD, Camat, Koramil dan Kapolsek. Dalam aksinya, warga meminta TNI AU untuk segera meninggalkan lokasi ter-sebut. Tetapi demontrasi warga tidak berlangsung lama karena helikopter milik TNI AU yang sengaja terbang rendah memaksa mereka untuk bubar.

10 Desember 2006 | Lima hari setelah melakukan unjuk rasa ke DPRD Bogor, warga kembali melakukan aksi demonstrasi di jalan raya Cisauk-Cicangkal. Setelah itu mereka mendarangi lo-kasi persawahan yang digali TNI AU. Areal yang digali tersebut luasnya mencapai 2 Ha dengan kedalaman 2 meter. Keesokan harinya pada tanggal 11, diadakan pertemuan antara warga desa Sukamulya dengan Komisi A DPRD Kab. Bogor. Warga meminta TNI AU untuk segera menghentikan penggalan areal persa-wahan milik warga, namun pihak TNI AU bersikeras akan terus melakukan penggalian sampai ada perintah untuk menghenti-kan penggalian tersebut dari Komandan Pusat (Dephan dan KASAU). Semenjak itu sering terjadi intimidasi yang dilakukan oleh TNI AU dan penjagaan yang ketat lengkap dengan senjata laras panjang di sekitar lokasi.

Bello, *Dark Victory*, Oakland, Calif. Food First 1994, hlm 27)

Kebanyakan pemerintah negara-negara Dunia Ketiga tak mempunyai pilihan lain kecuali menerima setiap syarat yang di-ajukan demi mendapatkan kucuran hutang baru, termasuk In-donesia, di mana pada bulan Januari 1998 Suharto menanda-tangani perjanjian dengan IMF. Siapapun yang duduk dalam jaja-ran pemerintahan—entah ia dipilih secara demokratis atau ti-dak—selama negara masih terjerat dalam lilitan hutang, maka ia harus mengikuti aturan dan perjanjian ekonomi yang telah di-sepakati sebelumnya.

Pemerintahan Global Baru—Trinitas Suci Baru

Globalisasi telah sejak awal membawa kontradiksi-kon-tradiksinya sendiri yang ditandai oleh konsep negara-bangsa yang dicetuskan oleh Ernest Renan tahun 1890-an. Bahkan ne-gara kesejahteraan nasional yang demokratis dan teratur pun tak pernah menyentuh realitas bahwa ada saling keterkaitan an-ter setiap negara, yang artinya tak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri tanpa jalinan ekonomi dengan negara lainnya. Teori-teori nasionalis juga tidak menyentuh realita bahwa dunia tidaklah merupakan sekedar sekumpulan orang-orang yang hi-dup terpisah dengan orang lainnya, dan bahwa sesungguhnya yang ada sejak awal adalah negara yang kuat mendominasi yang lemah—setiap negara terlalu bergantung pada negara lain, ter-masuk negara-negara adidaya, untuk dapat benar-benar me-nentukan apa yang harus berlaku di daerahnya masing-masing. Pasar dan bisnis beroperasi secara inter-nasional dan tidak se-lalu sejalan dengan kepentingan “negara mereka” beserta selu-ruh rakyatnya.

Pemerintahan-pemerintahan nasional telah memberikan kekuatannya pada “Trinitas Suci Baru”—IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO. Agensi-agensi ini semakin menentukan semua aturan yang harus diberlakukan dalam setiap negara, tentang bagaimana mereka akan beroperasi dan berkooperasi demi tu-juan yang satu: Agenda Korporasi.

Tapi justru tidak melenyapkan pemerintah-pemerintah nasional, sistem ekonomi global baru ini membutuhkan peme-

Tanah Rumpin adalah lahan pertanian yang produktif. Tanah yang telah dikelola oleh warga Suka-mulya secara turun-temurun ini memiliki sejarah kepemilikan yang panjang semenjak penjajahan Belanda hingga Jepang. Semenjak tahun 1955–1956 tanah ini diklaim sebagai milik TNI AU. Pada tahun 1976, BPN Bogor memberikan status Girik pada tanah tersebut, namun warga belum mampu merubahnya menjadi Surat Hak Milik (Sertifikat). Pada tahun 1991 TNI AU membuat pernyataan bahwa mereka adalah pemilik tanah seluas 1000 Ha tersebut. Sampai pada akhirnya tahun 2006 aksi pengklaiman kembali dilancarkan oleh pihak TNI AU.



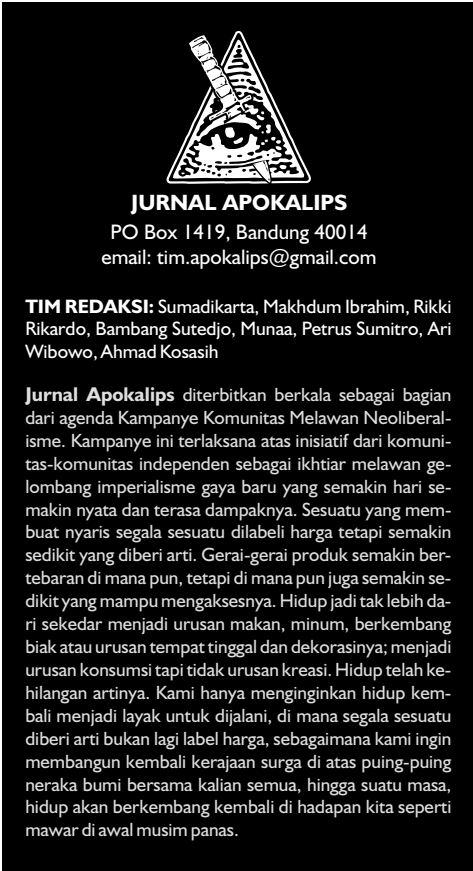
rintah nasional atau/dan bahkan juga lokal untuk menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi nasional/lokal ma-sing-masing demi meningkatkan efektifitas kerja sistem ekono-mi global itu sendiri.

Sebagaimana negara-negara di era pra-modern Eropa yang menandai semakin berkuasanya kelas kapitalis nasional, sistem ekonomi global ini melayani sekaligus didukung oleh se-makin maraknya korporasi-korporasi multinasional/ transna-sional (MNC/TNC). Sebagaimana juga kekuasaan monarki, Tri-nitas Suci Baru tersebut juga paham bahwa mereka hanya akan dapat terus berkuasa apabila membangun aliansi dengan kelas penguasa di setiap inchi daerah di mana mereka beroperasi. Te-tapi fungsi mereka justru lebih sedikit dibandingkan dengan fungsi pemerintahan konvensional—berhubung peran mereka yang nyaris tak nampak—yaitu hanya berfungsi dan tunduk pa-da Agenda Korporasi. Apabila dahulu raja adalah pengejawan-tahan Tuhan di atas bumi, maka kini tuhan-nya adalah Agenda Korporasi itu sendiri. Suka atau tidak, diakui atau tidak, hidup kita dan hidup anak-anak kita kini ada di bawah keku-saannya.



Tanah Rumpin adalah lahan pertanian yang produktif. Tanah yang telah dikelola oleh warga Suka-mulya secara turun-temurun ini memiliki sejarah kepemilikan yang panjang semenjak penjajahan Belanda hingga Jepang. Semenjak tahun 1955–1956 tanah ini diklaim sebagai milik TNI AU. Pada tahun 1976, BPN Bogor memberikan status Girik pada tanah tersebut, namun warga belum mampu merubahnya menjadi Surat Hak Milik (Sertifikat). Pada tahun 1991 TNI AU membuat pernyataan bahwa mereka adalah pemilik tanah seluas 1000 Ha tersebut. Sampai pada akhirnya tahun 2006 aksi pengklaiman kembali dilancarkan oleh pihak TNI AU.

bagai provokator. Beberapa orang yang diculik, diinterogasi, dan disiksa kemudian diserahkan ke Polsek Rumpin tanpa tuduhan yang jelas.



JURNAL APOKALIPS

PO Box 1419, Bandung 40014

email: tim.apokalips@gmail.com

TIM REDAKSI: Sumadikarta, Makhдум Ibrahim, Rikki Rikardo, Bambang Sutedjo, Munaa, Petrus Sumitro, Ari Wibowo, Ahmad Kosasih

Jurnal Apokalips diterbitkan berkala sebagai bagian dari agenda Kampanye Komunitas Melawan Neoliberal-isme. Kampanye ini terlaksana atas inisiatif dari komuni-tas-komunitas independen sebagai ikhtiar melawan ge-lombang imperialisme gaya baru yang semakin hari se-makin nyata dan terasa dampaknya. Sesuatu yang mem-buat nyaris segala sesuatu dilabeli harga tetapi semakin sedikit yang diberi arti. Gerai-gerai produk semakin ber-tebateban di mana pun, tetapi di mana pun juga semakin se-dikit yang mampu mengaksesnya. Hidup jadi tak lebih da-ri sekedar menjadi urusan makan, minum, berkembang-biak atau urusan tempat tinggal dan dekorasinya; menjadi urusan konsumsi tapi tidak urusan kreasi. Hidup telah ke-hilangan artinya. Kami hanya menginginkan hidup kem-bali menjadi layak untuk dijalani, di mana segala sesuatu diberi arti bukan lagi label harga, sebagaimana kami ingin membangun kembali kerajaan surga di atas puing-puing neraka bumi bersama kalian semua, hingga suatu masa, hidup akan berkembang kembali di hadapan kita seperti mawar di awal musim panas.



EDITORIAL

Indonesia dilanda krisis finansial dahsyat yang berlanjut hingga kini semenjak tahun 1997—yang sesungguhnya adalah akibat merosotnya nilai rupiah yang disebabkan karena para pe-ngusaha bank swasta Indonesia tak mampu mengembalikan hutang-hutang mereka yang pada tahun ter-sebut telah jatuh tempo—membuat Suharto pada bulan Januari 1998 menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) dengan Managing Director IMF, Michael Camdessus. Dan sejak itu jugalah, maka Indonesia mulai mengoperasikan apapun yang dikatakan IMF atas nama restrukturisasi Indonesia (i.e. pemotongan subsi-di publik, pembukaan keran impor, privatisasi, dll.). Tapi toh ketergantungan pada konsep ekonomi tipe ini bukanlah pertama kalinya, dan apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah konsekuensi logis dari apa yang terjadi sebelumnya. Pra-IMF, pemerintah Indonesia bukanlah Suharto, melainkan korporasi bankir Warburg & Co., Lehman Brothers dan Lazard Freres—tiga serangkai yang mempraksai pembentukan IGGI (InterGovernmental Group on Indonesia) atau grup intra-pemerintah yang tentunya memerintah Indonesia. Suharto hanyalah alat. Dan ia dibuang saat gaya-gaya bermainnya dianggap kuno dan tak efek-tif lagi. Pasca lengsernya sang diktator, kursi pemerintahan silih berganti diisi oleh berbagai kandidat dari berbagai partai politik yang menawarkan berbagai gaya main baru, tapi toh semuanya hanyalah alat di te-ngah lapangan permainan yang sama. Konsep ekonomi, cengkeraman hutang, semuanya tetap meng-arah pada satu hal yang sama; dari COMECON di era Sukarno, hingga IGGI di era Suharto, hingga kini pasca-IMF dan terlibatnya ADB yang entah sampai kapan, dan kesemuanya menegaskan hal yang sama, bahwa semua pemerintah hanyalah alat yang mengabdikan pada satu tuhan: Agenda Korporasi.

Ilusi Pelunasan Hutang IMF

Kunjungan Managing Director IMF

Secara formal Indonesia telah lepas dari hutangnya terha-dap IMF, namun bukan berarti Indonesia tidak lagi berhubungan dengan agenda pembangunan yang dicetuskan IMF 24 Januari 2007, Managing Director IMF, Rodrigo de Rato datang ke Jakar-ta. Kedatangan Rato ini adalah kedatangan pertama kalinya peja-bat teras IMF ke Jakarta sejak pelunasan hutang Indonesia sebe-sar US\$ 7,5 Miliar pada Oktober 2006. Kedatangan Rato disam-but berbagai spekulasi tentang maksud kunjungannya kali ini, terutama agenda apa yang hendak bicarakan nya bersama SBY. Selama keberadaannya di Indonesia, beberapa LSM berunjuk rasa di depan gedung perwakilan IMF di kompleks gedung Bank Indonesia, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa membawa poster-poster yang bertuliskan "*Build a new world without IMF*", "*Lawan penjajahan gaya baru: neoliberalisme*", "*IMF OUT*", dan poster lain yang intinya menolak upaya intervensi IMF atas Indonesia. Unjuk rasa ini berkaitan dengan prediksi adanya agenda tersembunyi yang dibawa Rato ke Jakarta. Ber-bagai pihak menyatakan kekhawatirannya jika Indonesia kem-bali melakukan pinjaman kepada IMF.

Terkait kedatangan Rato ke Jakarta, beberapa pejabat di pemerintahan termasuk SBY memberikan pernyataannya. "Kunjungan Managing Director IMF Rodrigo de Rato ke Indo-nesia, janganlah diartikan bahwa IMF akan menawarkan kembali bantuan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kita tidak ber-pikir atau merencanakan untuk berutang lagi pada IMF," kata SBY kepada wartawan se usai menerima Rato. Sedangkan Men-ko Perekonomian Boediono menyatakan bahwa Pemerintah In-donesia dalam waktu dekat tidak akan mengajukan proposal pinjaman hutang lagi kepada IMF. "Tidak ada rencana atau ke-perluan untuk itu, kita baru saja membayar kembali. Di sini pun tidak dibahas, dan tidak ada dalam rencana pemerintah untuk itu. Ini adalah kunjungan kehormatan yang tidak ada agenda

khusus. Intinya adalah bertemu untuk bertukar pikiran dan ber-tukar informasi menyangkut beberapa hal," kata Boediono. Se-cara keseluruhan pejabat pemerintah dalam pernyataannya me-negaskan bahwa kunjungan Rato sama sekali tidak membawa agenda pemberian hutang baru. Walaupun begitu, tetap ada agenda yang berkaitan dengan pemberlakuan liberalisasi eko-nomi di Indonesia. Untuk hal ini, IMF masih mempunyai tang-gung jawab menuntaskan tujuan finalnya melakukan liberalisasi ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Apalagi Boedio-no sendiri pernah memberikan pernyataan bahwa pemerintah masih akan mendengar saran dan menerima bantuan teknis terkait kebijakan perekonomian dari IMF.

Selain pujian-pujian yang diutarakan Rodrigo de Rato ke-pada pemerintah atas keberhasilan menjalankan program IMF di Indonesia, dalam pertemuan itu pula dibicarakan beberapa hal terkait situasi Indonesia lainnya. Salah satunya ialah prog-ram yang dijalankan program IMF di Indonesia sejak tahun 2003 sampai sekarang. Seperti yang diterangkan oleh SBY kepada Rato, yaitu masalah *triple track strategy*, atau strategi tiga jalur yakni stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan pengurangan ke-miskinan juga peningkatan lapangan kerja. Serta masalah me-negenai peran dari UKM dan pertanian yang sangat penting di da-lam strategi pembangunan Indonesia.

Berkaitan dengan program kemiskinan, nampaknya pe-merintah Indonesia belum mampu menjalankan program pe-ngurangan kemiskinan secara signifikan. Karena data BPS (Ba-dan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada 2004 persentase kemiskinan di Indonesia sekitar 16,7% atau sekitar 36 juta jiwa dengan rata-rata pendapatan perbulan sekitar Rp.122.775. Wa-laupun tahun 2000 persentase kemiskinan di Indonesia meni-apai 20.0 sehingga tahun 2004 menunjukkan penurunan, na-mun tahun 2006 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 0,6%. Indikasi naiknya kemiskinan bisa terlihat sekarang ini

terutama jika dikaitkan dengan menurunnya daya beli masya-rakat. Meningkatnya urbanisasi ikut memberi andil pada naik-nya angka kemiskinan. Pemerataan pembangunan dalam kenya-taannya tidak berlaku demikian, karena dalam era otonomi ini perputaran uang di Indonesia sekitar 60% masih berada di pu-lau Jawa, sedangkan daerah masih tetap tertinggal.

Kemudian yang mesti diperhatikan pada pertemuan itu ialah bicarakan nya masalah energi di Indonesia. Dalam per-nyataannya Boediono menerangkan bahwa yang dibahas ialah kebijakan pengelolaan energi Indonesia berkaitan program di-versifikasi energi yang sedang dijalankan. Lalu pembahasan kon-disi pengelolaan energi Indonesia serta hubungannya dengan kondisi energi dunia pada umumnya. Hal ini tentu saja sangat penting untuk dibicarakan terutama erat kaitannya dengan Indonesia yang didorong untuk menjadi negara pengekspor mi-nyak terbesar dan pengintegrasian sistem pengelolaan energi pada sistem global. Perlu diketahui bahwa kuota ekspor energi minyak dan gas Indonesia tahun 2006 paling besar jumlahnya selama kurun waktu 60 tahun, atau sejak negara ini merdeka. Naiknya kuota ekspor ini malah berimbas pada naiknya harga BBM di dalam negeri.

Masalah global ikut dibahas dalam pertemuan itu, yakni menyangkut masalah perkembangan ekonomi 2007, bagai-mana peran Amerika, Eropa, Jepang, China dan termasuk ma-salah seperti *global warming*, dan lain lain. "Mengenai bidang regional, isu yang dibahas antara lain integrasi keuangan di ka-wasan ini, masalah gerakan modal yang ada plus minusnya, ada masalah ada benefitnya, juga masalah China, mengenai peranan China dalam masalah pertumbuhan dan perkembangan ekono-mi di kawasan ini, maupun dikawasan global termasuk meng-e-nai masalah-masalah fleksibilitas, mengenai *exchange rate* atau sistem kurs itu pengaruhnya. Itu adalah poin-poin yang menjadi pembicaraan Presiden SBY dan De Rato," papar Boediono.

